

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Filipina telah berupaya untuk memerangi perdagangan manusia dengan meratifikasi Protokol Palermo yang merupakan instrumen kebijakan perdagangan manusia. Pemerintah Filipina meratifikasi satu, dari ketiga instrumen Protokol Palermo, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (PPST). Instrumen ini berperan sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan terkait perdagangan manusia di Filipina dengan menambahkan 13 kewajiban protokol yang telah dibuat. Pada tahun 2012, Filipina masih berada pada Tier-2 yang artinya masih belum sepenuhnya memenuhi standar untuk memerangi perdagangan manusia sesuai dengan *Trafficking Victim Protection Act* yang dibuat oleh U.S.

Filipina telah menjadi tempat transit ilegal yang biasa digunakan oleh para pelaku untuk meloloskan para calon migran masuk atau keluar negara Filipina melalui “pintu belakang selatan” yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pada tahun 2012 dan 2013 menjadi tahun dengan munculnya berbagai industri *cybercrime*, salah satunya yaitu bisnis prostitusi *Global Child Cybersex*. Pemerintah kemudian bergerak menjawab kekhawatiran terkait bisnis prostitusi tersebut dengan membuat undang *The Cybercrime Prevention Act of 2012*. Pada tahun 2014 dan 2015, demi menekan angka eksploitasi seksual *online*,

pemerintah Filipina meluncurkan layanan konseling hukum gratis dan aplikasi 1343 *Actionline* yang digunakan untuk masyarakat yang ingin melaporkan kasus perdagangan manusia secara *online*. Pada tahun 2016, dengan penuh perjuangan dan tekad yang kuat, Filipina telah mendapatkan peringkat Tier-1 dalam keberhasilan dan menekan angka perdagangan manusia sesuai dengan prosedur TVPA.

Melalui konsep Perdagangan Manusia dan tiga indikator utama dari teori *Domestic Salience* milik Cortell dan Davis yaitu wacana politik, perubahan lembaga, dan kebijakan negara, seluruhnya telah terlihat dalam penanganan perdagangan manusia di Filipina. Hal ini menandakan bahwa nilai dan normal dari Protokol Palermo yang diterapkan ke dalam sistem hukum dan lembaga nasional Filipina berhasil menurunkan angka perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dengan naiknya status Tier ke-1 Filipina yang diberikan oleh AS melalui TVPA.

Dalam wacana politik, Filipina menunjukkan komitmen kuat dengan membuat *National Action Plan* 2012 hingga 2016 yang merupakan kerangka kerja dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan perlindungan serta menjamin pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban. *National Action Plan* yang telah dibuat, memuat *Key Result Area* atau KRA yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur seberapa efektivitas program-program yang telah dibuat dan di implementasikan kepada masyarakat. Lalu pada perubahan lembaga, dibentuklah *Inter-Agency Council Againsts Trafficking* sebagai lembaga yang menangani masalah perdagangan manusia, lalu dengan

lembaga perbantuan lainnya yang masih dibawah pemerintah yaitu *Philippine National Police* bersama *Women and Child Portection Center, Department of Social Welfare and Development*. Dalam kerja sama para lembaga, mereka membuat banyak program dan pelatihan seperti *International Day Againts Child Trafficking, Internet Crimes Againts Children, Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons, Home Centre* untuk rehabilitasi korban perdagangan manusia yang diikuti oleh para aparat penegak hukum serta masyarakat. Dalam indikator kebijakan negara, Filipina mengesahkan undang-undang *Republic Act No. 9208* yang dikenal dengan *Anti Trafficking Act of 2003* yang kemudian diperluas dan diperkuat melalui *Republic Act No. 10364* atau *Expanded Anti-Trafficking Act of 2012*. Undang- undang tersebut menjadi pedoman untuk memerangi perdagangan manusia yang telah diratifikasi melalui ketentuan *Protokol Palermo*.

4.2 Saran

Peneliti berharap karya ini menjadi acuan awal bagi pembaca yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan menyajikan perspektif berbeda. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan wawancara langsung dengan korban perdagangan manusia di Filipina bersama dengan lembaga terkait. Dengan pembaruan data yang lebih lengkap dengan menganalisis lebih dalam terkait penerapan *Protokol Palermo* di Filipina.